



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**KONTRIBUSI MAHASISWA DALAM PENERAPAN
COOPERATIVE FARMING SEBAGAI UPAYA MENGATASI
KEMISKINAN SEKTOR PERTANIAN**

Bidang Kegiatan :
PKM Gagasan Tertulis

Diusulkan Oleh :
Niken Larasati Abimanyu (H14080018 / 2008)
Abdhu Rochman Soleh (C34090042 / 2009)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Judul Kegiatan | : Kontribusi Mahasiswa dalam Penerapan
<i>Cooperative Farming</i> sebagai Upaya
Mengatasi Kemiskinan Sektor Pertanian |
| 2. Bidang Kegiatan | : () PKM-AI (v) PKM-GT |
| 3. Bidang Ilmu | : Sosial Ekonomi |
| 4. Ketua Pelaksana Kegiatan | |
| a. Nama lengkap | : Niken Larasati Abimanyu |
| b. NIM | : H14080018 |
| c. Program studi | : Ilmu Ekonomi |
| d. Universitas | : Institut Pertanian Bogor |

Menyetujui
Ketua Departemen IE

Bogor, 26 Maret 2010
Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Dedi Budiman Hakim
NIP.19641022 198903 1 003

Niken Larasati Abimanyu
NIM.H14080018

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
NIP. 19581228 98503 1 003

Tintin Sarianti, SP, MM
NIP. 19750316 20050 12 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan PKM-GT yang berjudul **“Kontribusi Mahasiswa dalam Penerapan *Cooperative Farming* sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Sektor Pertanian”**. Upaya pembangunan pertanian Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih kalangan akademisinya. Sebagai pemuda dari kalangan akademisi masalah pertanian adalah salah satu masalah yang fundamental untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya karena menyangkut eksistensi dan hidup matinya suatu bangsa. Masalah pertanian menjadi sangat penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas.

Penulisan PKM-GT ini merupakan wujud kepedulian mahasiswa pada bidang pertanian khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan pada tingkat petani kecil. Melalui gagasan tertulis ini diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan bagi pihak berwenang dalam mengambil kebijakan yang pro-rakyat sehingga tujuan nasional dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kami menyadari dalam penulisan PKM-GT ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya tulis ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tintin Sarianti selaku dosen pendamping, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian PKM-GT ini.

Kami berharap PKM-GT ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kalangan petani dan turut serta dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bogor, 23 Maret 2010

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan	vi
Pendahuluan	1
Gagasan	4
Kesimpulan	15
Daftar Pustaka	16
Daftar Riwayat Hidup	17

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1 Rancang Bangun Model <i>Cooperative Farming</i>	13

DAFTAR TABEL

No		Halaman
1	Perkembangan Sektor Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Lapangan Pekerjaan	5

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk dan sumberdaya pertanian yang melimpah. Hal ini menjadi modal besar bagi sebuah pembangunan untuk mencapai kemakmuran. Namun tingginya jumlah penduduk dan melimpahnya sumberdaya alam ini tidak dibarengi dengan keterampilan masyarakat khususnya kalangan petani. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang didominasi kaum petani. Ironis sekali bila kita dengar sebuah negeri yang kaya dan subur namun petaninya miskin.

Selama ini banyak kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ini, namun kebijakan itu kurang populer serta sulit untuk diterima dan diterapkan di masyarakat. Hal ini mendorong kami untuk mencoba sistem baru yang lebih dapat diterima masyarakat yaitu berupa *cooperative farming*. Sistem cukup ideal untuk diterapkan karena menggunakan pendekatan budaya yang ada di masyarakat.

Secara garis besar model *Cooperative Farming* diterapkan dengan pemberdayaan petani melalui penyatuan fisik lahan milik keluarga petani atau kelompok petani yang kemudian dikelola secara bisnis agar terpenuhi skala ekonomi. *Cooperative Farming* mengombinasikan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Pihak yang dilibatkan dalam *Cooperative Farming* adalah petani, swasta, pemerintah dan mahasiswa. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Dengan sistem ini diharapkan masalah yang menghambat kemajuan petani selama ini dapat teratasi secara menyeluruh.

KONTRIBUSI MAHASISWA DALAM PENERAPAN *COOPERATIVE FARMING* SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN SEKTOR PERTANIAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertanian masih merupakan sektor yang penting, sebab sektor ini menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 104,485,444 orang, 41,53 persen bekerja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, Februari 2010). Sektor pertanian merupakan penyedia pangan yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Kontribusinya dalam menyumbang devisa dan dukungannya terhadap sektor industri tidak boleh diabaikan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan unit usaha yang relatif sempit. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat dari hasil sementara Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, pada tahun 1993 hanya 51,9 persen dari 20,8 juta rumah tangga petani saat itu. Tahun 2003, atau 10 tahun kemudian, porsi petani gurem 53,9 persen dari total rumah tangga petani. Tahun 2008, persentase petani gurem diproyeksikan 55,1 persen (<http://els.bappenas.go.id/>). Kenaikan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia.

Pembangunan sektor pertanian sudah selayaknya tidak hanya berorientasi pada produksi atau terpenuhinya kebutuhan pangan secara nasional, tetapi juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang terintegral dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilakukan sudah semestinya mengandung nilai-nilai: (a) Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan

masyarakat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan; (b) Peningkatan *harga diri*, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk dapat hidup mandiri terlepas dari penindasan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka; dan (c) Diperolehnya *kebebasan*, dalam arti kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan secara terus menerus bagi setiap individu maupun seluruh warga masyarakatnya.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat kebanyakan pelaku usaha pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil. Di sisi lain, petani hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar pertanian (*on-farm* atau *off-farm*). Usaha petani tidak cukup besar untuk merespons kelebihan tenaga kerja.

Pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Jadi selain peningkatan pendapatan dan *output*, juga berurusan dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial dan struktur administrasi serta sikap masyarakat, kebiasaan dan kepercayaan. Menurut rumusan hasil Konpernas XII PERHEPI, pengelolaan sumberdaya pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan struktural dan permasalahan kultural. Permasalahan struktural menyangkut faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, seperti: rendahnya teknologi yang diterapkan, terbatasnya akses modal, kelembagaan dan manajemen, kurangnya dukungan pemasaran, dan kelembagaan yang tidak mendukung. Permasalahan kultural ditandai oleh ciri masyarakat Indonesia, tingkat *karsanya* relatif rendah terutama diperani oleh ‘budaya lunak’ yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan terhadap hari esok yang lebih baik, cepat menyerah, *refreatism* (lebih berorientasi pada akherat), dan lamban.

Program-program pembangunan pertanian selama ini belum berpihak kepada petani kecil yang jumlahnya sangat banyak. Selain penguasaan lahan yang sempit, keterbatasan akses pada faktor produksi yang lain menjadi sebab keterpurukan petani. Situasi ekonomi yang ada, dengan ekonomi pasar dan kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong petani ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini semakin parah karena sumberdaya manusia petani belum mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, selain pengaruh nilai-nilai budaya yang menyebabkan petani semakin terjebak dalam dalam kemiskinan.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk: (a) mengungkapkan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh petani, dan (b) mencoba menawarkan alternatif pemecahan masalah yang bertumpu pada usaha pengembangan sumberdaya petani. Tindakan yang dilakukan merupakan usaha-usaha untuk mengubah keadaan saat ini (*recent status*) dengan keadaan yang normatif/diharapkan/diinginkan (*normative/expected/-desirable status*), yaitu kemampuan petani dalam mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya di atas garis kemiskinan.

Penulisan karya tulis ini diharapkan memberikan kontribusi melalui gagasan yang ditawarkan sehingga masalah petani yang diungkapkan dapat teratasi dengan baik. Perekonomian petani pun akan meningkat. Dengan demikian, tujuan nasional Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Hal ini akan memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

GAGASAN

Kondisi Kekinian

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyumbang PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Secara geografis negara Indonesia memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Negara Indonesia memiliki jumlah radiasi sinar matahari sepanjang tahun yang melebihi radiasi solar sehingga peluang rotasi tiga sampai empat kali per tahun yang sangat potensial. Suhu di Indonesia juga tidak terlalu panas dengan ketinggian wilayah ideal yang membuat pertumbuhan tanaman maksimal. Indonesia juga terletak di luar zona Angin Topan dan banyak penelitian yang menunjukkan adanya kelebihan daya tumbuh tanaman pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Selain sumber daya alam yang melimpah, negara Indonesia juga mempunyai lahan yang cukup luas, misal, masih ada 30,4 juta hektar hutan cadangan, 6,3 juta hektar rawa-rawa, 8,1 juta hektar tanah yang masih belum dimanfaatkan, 790 juta hektar laut merupakan potensi sangat besar yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Berdasarkan data BPS 2007 sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yaitu lebih dari 40 persen. Namun, dengan banyaknya serapan tenaga kerja tersebut, ternyata sektor pertanian hanya mampu menyumbangkan kurang lebih 14 persen dari total PDB sebesar Rp 3957,4 triliun pada tahun 2007. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian memang paling besar tapi itu tidak membuat sektor pertanian menjadi sektor paling unggul di antara sektor-sektor lainnya karena sektor pertanian Indonesia sebagian besar masih subsistem.

Tabel 1. Perkembangan Sektor Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Lapangan Pekerjaan

Jenis Lapangan Kerja	2008 (Februari)	2008 (Agustus)	2009 (Februari)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	42,689,635	41,331,706	43,029,493
Pertambangan dan Penggalian	1,062,309	1,070,540	1,139,495
Industri Pengolahan	12,440,141	12,549,376	12,615,440
Listrik, Gas dan Air	207,909	201,114	209,441
Bangunan	4,733,679	5,438,965	4,610,695
Perdagangan, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	20,684,041	21,221,744	21,836,768
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	6,013,947	6,179,503	5,947,673
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Per	1,440,042	1,459,985	1,484,598
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Peorangan	12,778,154	13,099,817	13,611,841
Total	102,049,857	102,552,750	104,485,444

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Subsistem sektor pertanian merupakan subsistem hulu dan subsistem budidaya. Kedua subsistem tersebut merupakan penyokong bagi sektor pertanian yang ada. Namun, komoditas yang dihasilkan merupakan komoditas primer yang memiliki nilai tambah yang rendah dibandingkan dengan komoditas sekunder kelanjutan dari subsistem budidaya yakni subsistem hilir. Nilai tambah yang rendah dikarenakan produktivitas hasil pertanian yang kurang. Dalam arti tidak hanya dilihat dari sisi petani yang mengelolanya tetapi juga dilihat dari insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa revitalisasi pertanian serta keterlibatan pihak-pihak lain seperti pihak swasta dan lembaga-lembaga keuangan.

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar-menawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Selain masalah internal petani

tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar. Meskipun tidak bias berbasis teknologi tinggi, tetapi landasan sektor pertanian yang kokoh diperlukan dalam memacu pertumbuhan perekonomian sekaligus mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan.

Secara umum kondisi kemiskinan di Indonesia terutama di pedesaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, pendidikan yang rendah, kekurangmampuan dalam hal teknis dan manajemen, keterbatasan akses pada sumber modal, ketimpangan distribusi lahan, ketimbangan gender dan bencana alam. Hal itu berakibat penduduk desa berpendapatan rendah, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, suara dan aspirasi yang kurang didengar, keberadaan yang kurang diperhatikan dan terpinggirkan dari komunikasi global.

Ada faktor yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami kendala dan bahkan dinilai gagal pada saat ini. Sebagian besar program pengentasan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin (raskin) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin.

Solusi yang Pernah Ditawarkan

Pada tahun 2007, pemerintah telah berhasil membuat program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai sektor lain terkait dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan Departemen Pertanian, merupakan kegiatan yang spektakuler untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian utamanya indikator makro. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah: a) Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), b) Pengembangan Kawasan dan Sentra Hortikultura, c)

Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, d) Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu, f) Fasilitas Pengembangan Jarak Pagar, g) Akselerasi Pengembangan Kapas, h) Pemberdayaan Usaha Kelompok, i) Restrukturisasi Perunggasan, j) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK, k) Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB), l) Fasilitas Alat Pasca Penen, m) Pengelolaan Infrastruktur Pertanian, n) Program Aksi Desa Mandiri Pangan, o) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP), p) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, q) Penyusunan Kalender Tanam Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global, r) Pengentasan Kemiskinan melalui Kegiatan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi, s) Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani), t) Pengembangan Energi Alternatif, u) Bantuan Untuk LM3, v) Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), w) Pelaksanaan Kegiatan Penunjang, x) Pengawasan Lalulintas Komoditas Pertanian dan y) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian (<http://www.deptan.go.id>).

Program-program pembangunan pertanian dalam mengatasi masalah kemiskinan memiliki banyak manfaat bagi petani yang secara umum hidup sangat tidak sejahtera. Di tahun 2007, Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan program strategis sebagai upaya terobosan guna memacu peningkatan produksi padi (beras) nasional dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan mengisi peluang pasar ekspor. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK (Penguatan Modal Usaha Kelompok) ditujukan untuk membantu petani melalui Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk mengembangkan usaha taninya serta meningkatkan produktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dari kelompok PMUK. Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan pada desa lama antara lain: seleksi lokasi sasaran, sosialisasi program, pendampingan, penyusunan data dasar desa, pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan rencana pembangunan desa mapan partisipatif. Dalam mendukung pelaksanaan Program P2BN dicanangkan Gerakan

Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/ Beras (GP4GB) di tujuh propinsi dan tiga belas kabupaten. Gerakan ini merupakan gerakan terpadu yang melibatkan, Perum Bulog, BRI dan Bukopin serta Asosiasi Petani.

Upaya pemberdayaan lain bagi para petani dapat dilihat dari program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) oleh Departemen Pertanian. P4K bertujuan membangun sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu penduduk miskin memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, melalui pencapaian kemandirian dan mengantarkan mereka keluar dari kemiskinan dengan kekuatan mereka sendiri. Sistem partisipatif dan berkelanjutan tersebut berwujud kelompok-kelompok swadaya.

Pemberdayaan *Corporate Farming* pernah diterapkan sebelum *Cooperative Farming*. *Corporate Farming* cenderung bersifat *top-down* atau sentralistik sehingga pengimplementasiannya sangat tidak optimal. Distribusinya menyebabkan upaya pemberdayaan tidak efisien dan kurang merata sehingga banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau.

Perbaikan Gagasan Terdahulu

Hasil studi program P4K, seperempat abad program P4K telah mampu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 66.663 Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) sejak tahun 1979. Jumlah KPK yang aktif menjadi 58.118 KPK setelah proses validasi tahun 2003, dengan jumlah anggota keseluruhan 646.681 rumah tangga petani-nelayan kecil. KPK-KPK tersebut tersebar di 10.720 desa, 1973 kecamatan, 127 kabupaten dan 12 provinsi tahun 2002 dan 2005, jumlah anggota rumah tangga petani-nelayan kecil adalah 4,1 jiwa. Dengan demikian P4K telah melayani sekitar 2,5 juta jiwa penduduk miskin di pedesaan, dimana sekitar 2,1 juta jiwa diantaranya telah keluar dari garis kemiskinan (diolah berdasarkan Hasil Studi Dampak P4K oleh BPS, tahun 2002 dan 2005) (Harniati, Prosiding Seminar Nasional).

Pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai rata-rata 7% per tahun, namun perekonomian tetap rapuh karena sektor pertanian di pedesaan tidak mendapat porsi atau perhatian yang memadai dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berasal dari kalangan

petani. Hal ini mengundang perhatian yang sangat mendalam karena telah kita ketahui bersama bahwa kualitas dan keanekaragaman Sumber daya Alam (SDA) Indonesia sangat tinggi. Namun, tingginya potensi ini tidak dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaannya yang memadai. Program-program pemerintah yang telah dicanangkan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin namun tidak dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang berasal dari kaum petani. Data terakhir bulan Maret tahun 2009, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 2,43 juta jiwa, dari 34,96 juta jiwa (15,42 persen) menjadi 32,53 juta jiwa (14,15 persen) (www.bps.go.id). Padahal sebagian besar lapangan kerja didominasi oleh sektor pertanian yang secara nyata sebagai penyokong sektor industri dalam menghasilkan produk sekunder. Jika dua hal di atas dapat ditingkatkan maka dapat dipastikan bahwa perekonomian masyarakat meningkat. Untuk itu perlu diciptakan suatu sistem penataan masyarakat khususnya petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat mereka dari garis kemiskinan.

Oleh karena itu, *Cooperative Farming* merupakan upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di sektor pertanian. Perbaikan sistem yang ada seperti *Corporate Farming* diubah menjadi program pemberdayaan *Cooperative Farming*. Program tersebut cenderung terdistribusi hingga ke daerah pertanian pedesaan karena sifatnya yang *bottom-up* atau desentralistik. Pencapaian program pemberdayaan sangat efisien dan optimal karena melibatkan banyak pihak selain petani.

Pihak-pihak yang Dipertimbangkan

Tentu saja masalah kemiskinan di sektor pertanian tidak bisa disalahkan pada salah satu pihak, terutama pemerintah. Tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat melalui program-programnya. Program tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat-rakyatnya. Melalui DPR, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan pelaksanaannya dilakukan oleh para menteri-menteri kabinet. Dalam hal ini, sistem koordinasi dan informasi antarlembagaan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi miskomunikasi yang

menyebabkan adanya kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Semua hal di atas dilakukan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan secara umum. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, pemerintah pusat tidak serta merta terjun langsung melaksanakan kebijakannya, dalam hal ini tiap-tiap daerah memiliki kepala daerah masing-masing berikut dengan para pejabat-pejabatnya. Tiap daerah memiliki otonominya masing-masing. Sektor pertanian ditangani oleh Kementrian Pertanian pada pemerintah pusat dan Dinas Pertanian pada pemerintah daerah.

Semua hal yang berkaitan dengan program-program pemerintah memiliki anggarannya masing-masing. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan disalurkan kepada masyarakat. Bentuk anggaran bisa juga disalurkan langsung ke tiap-tiap daerah sesuai dengan APBD yang direncanakan, yang sudah pasti disetujui pula oleh pemerintah pusat. Untuk itu, sebenarnya yang paling bergantung pada masyarakat adalah pemerintah daerah yang memang tahu mengenai kondisi permasalahan daerahnya. Diperlukan kecakapan dalam melihat kondisi pertanian di tiap daerah dan menginfokannya kepada pemerintah pusat apabila terdapat kendala-kendala.

Selain pemerintah, masyarakat pun harus mendukung program pemerintah yang ada. Kesepakatan antara kedua belah pihak sangat diperlukan agar program yang dibuat maksimal dalam pelaksanaannya. Ekspektasi masyarakat di sini sangat diperlukan agar mendukung program pemerintah. Namun, apabila ada penyimpangan entah dari pemerintah maupun masyarakat maka proses persetujuan terhadap suatu kebijakan harus dirundingkan kembali dan diambil jalan tengahnya melalui musyawarah.

Kaum-kaum intelektual pun sangat diperlukan, karena merekalah perancang atau otak di balik kebijakan. Dalam arti pemerintah pun butuh orang-orang yang cerdas dan pintar dalam membuat kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kaum intelektual tidak harus yang sudah lanjut usia, namun kaum-kaum pemuda pun bisa menjadi kaum intelektual, contohnya saja mahasiswa. Mahasiswa merupakan para penggerak negeri, yang nantinya akan menjadi benih-benih bangsa dan menggantikan kaum intelektual terdahulu.

Dalam konteks masalah, mahasiswa pertanian sangat diperlukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di sektor pertanian. Mereka dapat menjadi tenaga penyuluh di tiap daerah pertanian, dimana keadaan para petani sesungguhnya berpendidikan rendah sehingga sangat diperlukan orang-orang yang ahli di bidang pertanian, baik dalam hal praktek pertanian dan pembaharuan teknologi pertanian. Tidak hanya mahasiswa pertanian saja, mahasiswa yang berasal dari bidang lain pun bisa mendampingi para petani desa, misalnya saja mahasiswa jurusan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, sektor pertanian tidak hanya dikaitkan dengan masalah pertanian saja tapi masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya serta teknologi. Kesemuanya merupakan satu-kesatuan yang dapat menghasilkan suatu produktivitas pertanian, efisiensi dalam pengelolaan pertanian dan dapat membangun martabat para petani dalam mencapai kesejahteraannya.

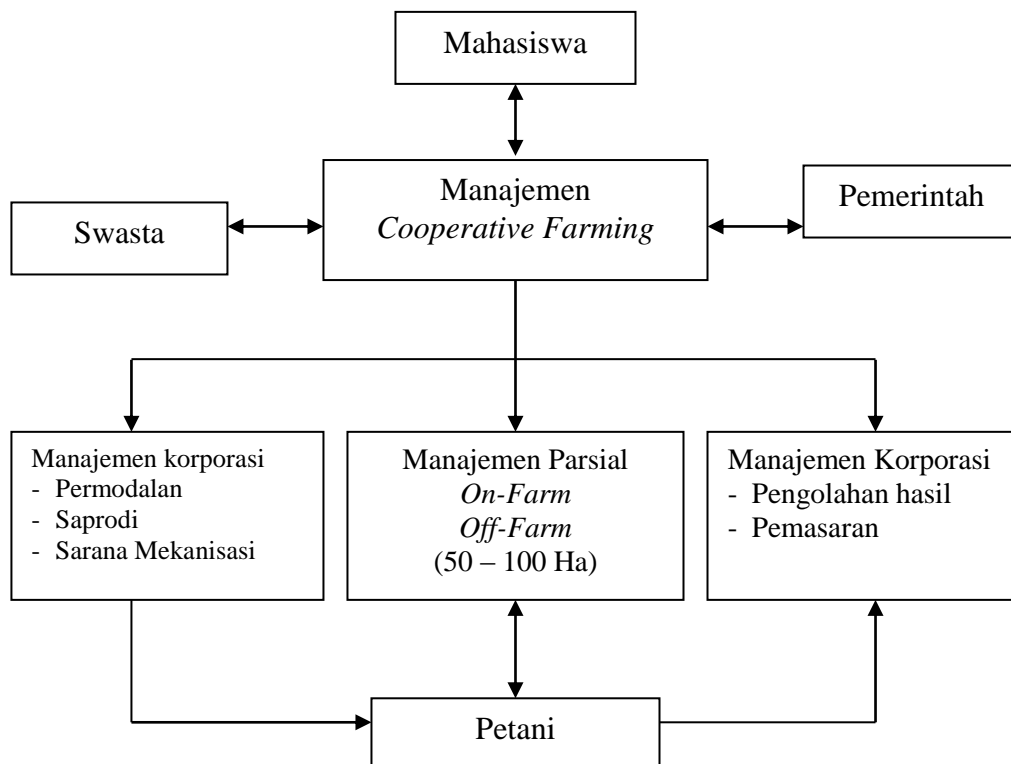
Pihak pendukung lain, seperti para pemberi modal harus ikut berperan dalam meningkatkan sektor pertanian. Investor-investor dalam negeri harus bisa menanamkan modalnya di sektor pertanian, untuk itu dibutuhkan minat terhadap sektor tersebut apabila mereka melihat dari berbagai aspek yang ada selain mencari keuntungan. Lembaga-lembaga keuangan pun harus ikut berperan, terutama bank-bank konvensional dan bank-bank syariah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Muamalat dsb., Lembaga Keuangan Mikro (LKM), lembaga perkreditan rakyat, koperasi (KUD) dan pegadaian negara yang dapat menjangkau ke pelosok desa pertanian.

Langkah-langkah Strategis

Berdasarkan permasalahan dan pemahaman kondisi eksternal petani yang demikian, maka model *Cooperative Farming* dapat digunakan sebagai alternatif pemberdayaan usahatani. Model pemberdayaan petani melalui penyatuan fisik lahan milik keluarga petani atau kelompok petani yang kemudian dikelola secara bisnis agar terpenuhi skala ekonomi. *Cooperative Farming* mengombinasikan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Rekayasa sosial dilakukan dengan mengetahui secara empiris dan studi kasus mengenai kondisi pertanian pedesaan. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan

untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian teknologi yang biasa digunakan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha *off-farm* dari produk primer menjadi produk sekunder. Ketiga rekayasa tersebut harus dikoordinasi secara vertikal dan horizontal sehingga akan melibatkan banyak pihak yang diwadahi dalam satu kemitraan.

Pihak yang dilibatkan dalam *Cooperative Farming* adalah petani, swasta, pemerintah dan mahasiswa. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sekelompok petani yang sudah dibentuk dari beberapa kepala keluarga harus secara aktif mengelola perencanaan *on-farm* (produk primer) dan *off-farm* (produk sekunder) dengan aset-aset seperti lahan pertanian dan teknologi yang digunakan. Peran swasta di sini karena fungsinya sebagai investor atau penanam modal dikarenakan investor memiliki minat terhadap *Cooperative Farming* tersebut karena pengelolaannya tidak hanya menghasilkan produk primer saja tapi juga produk sekunder yang memiliki nilai tambah. Pihak swasta akan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan untuk berusaha tani. Selain itu, pihak swasta juga bertanggung jawab sebagai penampung produksi (badan penyanggah produk pertanian sekunder) dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil. Di sini, peran mahasiswa melalui institusi perguruan tinggi melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilibatkan sebagai tenaga penyuluh pertanian pedesaan, terutama meningkatkan pendidikan bidang ilmu pertanian berupa bagaimana cara untuk mengelola lahan pertanian yang baik serta teknologi yang akan digunakan, pendidikan mengenai strategi pemasaran secara sederhana, lebih mengenalkan kepada mereka bagaimana cara mengelola produk pertanian (produk primer) menjadi suatu barang (produk sekunder) yang memiliki nilai tambah serta sebagai pihak yang menghubungkan antara petani dengan swasta dan pemerintah.



Gambar 1. Rancang Bangun Model Cooperative Farming

Sumber : <http://pse.litbang.go.id>

Permasalahan lahan menjadi kondisi umum bagi para petani. Produktivitas sistem kelola sawah yang tinggi dan harga jual gabah yang bagus, membawa keberuntungan usaha bagi petani, yaitu petani pemilik lahan yang agak luas, lebih dari satu hektar. Setiap petani ideal memiliki lahan minimal dua hektar per Kepala Keluarga (KK). Setiap desa memiliki 50-70 KK petani (<http://www.litbang.deptan.go.id/>).

Cooperative Farming dalam manajemen parsial harus memiliki luas lahan 50 – 100 hektar. Untuk itu, dalam setiap desa bisa dibentuk *Cooperative Farming* 1 – 2 perusahaan (industri *on-farm* dan *off-farm*). Tingkat efisiensi produk akan semakin meningkat seiring dengan adanya diferensiasi tugas dalam *Cooperative Farming* tersebut.

Untuk membentuk *Cooperative Farming* dibutuhkan pihak yang bias mengkoordinir. Diantaranya pemerintah selaku pembuat kebijakan, swasta sebagai pemberi modal dan ditambah mahasiswa sebagai tenaga penyuluh untuk

pemberdayaan masyarakat petani. Mahasiswa disini tidak hanya berasal dari bidang pertanian saja namun dari berbagai bidang seperti teknologi pertanian, social ekonomi serta budaya juga sangat dibutuhkan.

Ketiga pihak tersebut membentuk suatu manajemen *Cooperative Farming*. Manajemen *Cooperative Farming* terdiri dari manajemen korporasi dan manajemen parsial. Sistem manajemen lalu dikelola oleh sekelompok para petani berdasarkan hasil musyawarah antara petani, mahasiswa, pemerintah dan swasta.

KESIMPULAN

Model *Cooperative Farming* merupakan model pemberdayaan masyarakat yang sangat baik di pedesaan. Selain industri hulu, *Cooperative Farming* juga memenuhi skala industri pengolahan (industri hilir). Karena karakteristik pertanian Indonesia memiliki keragaman biofisik-sosial antarruang sehingga memerlukan pengelolaan secara desentralisasi atau *bottom-up*. Pengelolaan pertanian yang tidak bergantung pada pusat (*top-down* atau sentralistik) membuat distribusi pemberdayaan masyarakat petani semakin terjangkau. Namun kebijakan tersebut harus dibarengi dengan konsistensi implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Cooperative Farming melibatkan banyak pihak selain petani, yaitu pemerintah, swasta dan sekaligus mahasiswa pertanian sehingga tidak sedikit orang yang dilibatkan. Mahasiswa sebagai tenaga penyuluh merupakan aset penting dalam memperbaiki sektor pertanian ke depan. Untuk itu perlu diperhatikan tahap-tahap sebagai berikut : 1) identifikasi potensi wilayah, 2) pengorganisasian petani anggota kelompok wilayah, 3) penentuan paket teknologi spesifik lokasi, 4) konsolidasi pengadaan saprodi, 5) konsolidasi pelaksanaan usaha *on-farm*, 6) konsolidasi kegiatan pascapanen, dan 7) konsolidasi kegiatan pemasaran. Setiap tahapan tersebut merupakan faktor keberhasilan kegiatan *Cooperative Farming*. Selain harus terpenuhi persyaratan wilayah, *Cooperative Farming* harus mempunyai struktur organisasi yang mantap, dilengkapi dengan pengurus dan seksi-seksinya. Struktur organisasi dari posisi teratas terdiri dari musyawarah anggota, forum komunikasi kelompok, pengelola (manajer, sekretaris dan bendahara), seksi-seksi dan sub kelompok. Bisa dikatakan, bahwa mahasiswa merupakan penghubung antara petani dengan pemerintah dan swasta dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Adanya keterkaitan antara sub-sektor hulu (hasil pertanian) dan sub-sektor hilir (pascapanen dan pemasaran) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pemasaran produk hasil pertanian. Kolaborasi keempat pihak tersebut mendorong agar pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian akan meningkatkan nilai tambah pada produk pertanian yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Harniati. 2008. Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan: Pengalaman Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) sebagai Sebuah Model Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi III*. Jakarta: LP3ES.

Nuhung, Iskandar Andi. 2006. *Bedah Terapi: Pertanian Nasional*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

<http://www.deptan.go.id/> [19 Maret 2010]

<http://www.litbang.deptan.go.id/> [19 Maret 2010]

<http://pse.litbang.go.id/> [19 Maret 2010]

<http://www.bps.go.id/> [19 Maret 2010]

<http://els.bappenas.go.id/> [20 Maret 2010]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Pertama

Data Pribadi

Nama : Niken Larasati Abimanyu
NRP : H14080018
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas : Institut Pertanian Bogor
TTL : Indramayu, 30 Mei 1990
Alamat : Perum. Bumi Mekar Permai, Jl. Semangka No. 34
Rt. 05/10, Kel. Lemah Mekar, Indramayu 45212
Telepon / HP : (0234) 7006258 / 085695668334
Email : nqueen_luna@yahoo.com
IPK : 3,0

Pendidikan

1995 – 1996 : Taman Kanak-kanak Aisiyah indramayu
1996 – 2002 : SDN Karanganyar I Indramayu
2002 – 2005 : SMPN 2 Sindang Indramayu
2005 – 2008 : SMAN 46 Jakarta
2008 – sekarang : Institut Pertanian Bogor, Dept. Ilmu EKonomi

Pengalaman Organisasi

2003 – 2004 : Kabid I OSIS SMP
2006 – 2007 : Anggota ROHIS SMA Dept. Keputrian
2007 : ketua Pelaksana Dialog Keputrian ROHIS SMA
2007 : PJ Kelompok Pesantern Kilat Akhwat ROHIS SMA
2008 – 2010 : Anggota IAAS IPB, Dept. Project
2008 – 2009 : Bendahara Dept. PSDM BEM TPB IPB
2009 : Ketua Pelaksana Keg. Try Out Kalkulus IPB
2009 : Sekretaris Keg. IPB PKM generation BEM TPB IPB
2009 – 2010 : Bendahara Dept. Perekonomian BEM FEM IPB

Prestasi

1999 : Juara I Lomba Membaca Puisi Madrasah Al-Furqon

1999	: Juara I Lomba Melukis Madrasah Al-Furqon
1999	: Juara III Lomba Cerdas Cermat Madrasah Al-Furqon
2006 & 2007	: Olimpiade Sains Kimia Tingkat Jaksel
2006	: Olimpiade Sains Kimia Tingkat DKI Jakarta
2007	: Lomba Bahasa Inggris SMAN 70 Jakarta
2007	: Lomba Membaca Puisi SMA Al-Izhar Jaksel
2009	: PKM-K Dikti

Penulis Kedua

Data Pribadi

Nama	: Abdhu Rochman Soleh
NRP	: C34090042
Departemen	: Teknologi Hasil Perairan
Fakultas	: Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan
Universitas	: Institut Pertanian Bogor
TTL	: Jombang, 19 Desember 1990
Alamat	: Jalan Pasar jeruk Rt:01 Rw:08 Gadingmangu, Perak Jombang Jawa Timur
Telepon / HP	: 085694287892
Email	: Gama_R313J@yahoo.com

Pendidikan

1996 – 1997	: Taman Kanak-kanak Budi Utomo Gadingmangu
1997 – 2003	: SDN Gadingmangu 1
2003 – 2006	: SMPN 1 Perak Jombang
2006 – 2009	: SMAN 1 Jombang
2009 – sekarang	: Institut Pertanian Bogor, Dept. Teknologi Hasil Perairan

Pengalaman Organisasi

2007 – 2008	: Ketua KIR SMAN 1 Jombang
2009 – 2010	: Anggota Korpus IPB, Dept. Sponsorship
2009 – 2010	: Anggota JAC IPB (Jombang Agrostudent Community)
2009 – 2010	: Anggota IMAJATIM IPB, Dept. Kewirausahaan.

Prestasi

- 2007 : Olimpiade Geografi tingkat Jawa Timur
- 1999 : Juara II Lomba Eassay tingkat nasional Universitas
Brawijaya
- 2009 : PKM-K Dikti